



Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jenderal. Soedirman, Universitas Udayana, dan Sekolah Tinggi Teknik Jember, yang diharapkan mendukung program IIHD.

Untuk “Wilayah Barat” upaya Peningkatan Mutu Manusia (*Human Development*) melalui kesepakatan serupa dilaksanakan Yayasan Damandiri bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat. Penandatanganan Naskah Kerjasama antara YDSM dan Institut Pertanian Bogor (IPB) berlangsung Juni 2005 oleh Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof.DR.Haryono Suyono-Yayasan Damandiri dan Prof Ahmad Ansori Mattjik-Rektor IPB.

Ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) IPB, Bogor, DR Ir. Illah Saillah MSc berkata, penunjukan dari Yayasan Damandiri agar IPB menjadi koordinator pengembangan SDM “Wilayah Barat”, terutama kegiatan yang digerakkan oleh Universitas segera ditindak lanjuti.

Pada tahap awal Pengembangan Upaya Peningkatan Mutu Manusia mengajak 10 (sepuluh) perguruan tinggi antara lain di Jakarta, Bogor, Bandung, Palembang, Lampung, Bengkulu, Organisasi Profesi seperti IBI dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta mitra kerja peduli pengentasan kemiskinan. Selain itu rencana program untuk 6 bulan segera disusun setelah ditandatanganinya naskah kerjasama, antara lain pengembangan Sekolah Unggul dan Peningkatan Kualitas Bidan dan pelayanannya, penyelenggaraan seminar-seminar, pelatihan terkait peningkatan HDI Indonesia serta penelitian.

Meski kerjasama Yayasan Damandiri dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) perguruan tinggi di Wilayah Barat baru beberapa bulan,



untuk Universitas Padjajaran Bandung tergolong cepat bergerak. Sejak ditandatangani naskah kesepakatan kerjasama pada pertengahan Agustus 2005 lalu, LPM Unpad telah mengembangkan *pilot projectnya* ke 4 (empat) sekolah SMA untuk disandingkan dengan 2 (dua) sekolah favorit di kota Bandung.

Drs Athwar Bajari, Msi, Ketua Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat, berkata program kerjasama Yayasan Damandiri dan LPM Unpad, yang telah terealisasi adalah program pelatihan guru magang di sekolah-sekolah favorit sejak Oktober 2005 lalu selama tiga bulan. Guru yang terpilih mengikuti pelatihan ini pun dibatasi untuk 5 (lima) guru bidang studi eksakta dan 5 (lima) bidang studi ilmu bahasa dan sosial di masing-masing sekolah yang ditunjuk. Yaitu, guru-guru yang langsung berhubungan dengan peningkatan human development indeks (HDI) seperti mata pelajaran kimia, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan ilmu-ilmu sosial.



Penentuan sekolah yang berhak mendapatkan pelatihan dari Program Yayasan Damandiri tidak sepenuhnya ditentukan oleh LPM Unpad, melainkan dari Dinas Pendidikan yang memiliki sejumlah data akurat tentang kondisi sekolah di Jawa Barat.

Dari kerangka acuan Dinas Pendidikan Jawa Barat ini terpilih SMA Negeri 26, SMA Yayasan Atika Sunda, SMA Negeri 1 Cileunyi dan SMA Negeri 1 Lembang yang merupakan sekolah dalam kategori masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Dan sekolah pembanding sebagai sekolah yang dikenal cukup banyak melahirkan bibit-bibit unggul di Bandung adalah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5. Para guru harus melakukan kegiatan belajar mengajar yang menyangkut perkembangan bahan ajar, administrasi sekolah, manajemen proses pembelajaran termasuk melakukan kunjungan ke kelas

Dalam pelaksanaannya, masing-masing guru mendapatkan anggaran untuk memenuhi biaya buku, transportasi dan sekaligus sebagian biaya diserahkan kepada sekolah pembina, SMA 3 sebagai pembina ilmu eksakta dan SMA 5 sebagai pembina ilmu bahasa dan ilmu-ilmu sosial. Dari total anggaran sebesar Rp 20 juta untuk pelatihan guru, masing-masing sekolah juga mendapat anggaran untuk pengembangan manajemen sekolah sebesar Rp 2,5 juta. Bantuan manajemen sekolah ini, langsung diberikan melalui Damandiri tidak melalui LPM. Jadi sekolah yang bersangkutan yang menerima.

Dari tiga paket program pengembangan SDM di wilayah barat yang meliputi studi visit guru ke sekolah-sekolah unggul, dua paket lainnya yaitu pelatihan siswa SMA dan peningkatan kesejahteraan bidan rencananya akan direalisasikan akhir Desember 2005. Untuk pelatihan para murid, LPM Unpad diberi mandat memanfaatkan anggaran sebesar Rp 10 juta per



wilayah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyiapkan pelatihan, metode belajar mengajar, transportasi para murid dan konsumsi. Pelatihan direncanakan selama satu minggu sekaligus siswa juga mengadakan kunjungan lapangan atau praktek kerja.

Di Wilayah Timur Rektor UNAIR Prof.Puruhito, berkata LIPM UNAIR telah mengerahkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian di 13 kabupaten. Penelitian ini dijadwalkan selesai dalam waktu 1 bulan, untuk kemudian dipaparkan kepada para bupati bersangkutan.

“Dengan demikian apa yang disajikan IIHD, bukan sekadar asumsi, tetapi data nyata yang tersedia. Bisa saja bupatinya tidak puas, tapi minimal data IIHD bisa menjadi masukan untuk perbaikan data yang ada. Karena, data statistik Kabupaten biasanya terkumpul begitu saja, variabelnya tidak berubah sementara bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi serta kebiasaan/sikap masyarakat terus berubah/bekembang dan perlu menjadi perhatian utama,” kata Prof. Puruhito.

Hasil kajian dan inovasi dari setiap Kabupaten/Kota September 2004 telah disajikan kepada Bupati/Walikota dalam suatu pertemuan forum Komunikasi yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Program di Jawa Timur.

Dari pertemuan forum Komunikasi tersebut menghasilkan rancangan program/kegiatan dari setiap Kabupaten/Kota untuk melengkapi dan memperkuat program-program yang telah ada dan disebarluaskan ke Kabupaten/Kota lain dalam jejaring nasional maupun internasional melalui *AUICK (Asian Urban Informations Center of Kobe)*.

Melalui LIPM/IIHD berbagai program yang sudah ditumbuhkan sejak



tahun 2002 semakin ditingkatkan. Jangkauan maupun cakupannya semakin diperluas, utamanya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Mulai awal 2004 sampai akhir 2005 upaya pengembangan sumber daya manusia, bekerja sama dengan Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia (LIPM)-Wilayah Timur” telah mengajak sekitar 20 Perguruan Tinggi yang giat dalam kegiatan demikian.

Bentuk kegiatannya bervariasi mengacu kreatifitas upaya pemberdayaan manusia yang dikembangkan LIPM maupun Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) di wilayah masing-masing seperti pelatihan, seminar dan diskusi serta penelitian untuk menggali dan mengkaji program yang tepat di era otonomi.

Program aksi yang kemudian mendarat antara lain pengembangan sekolah unggul, dan Program Magang, Upaya Peningkatan Kualitas Bidan dan lain-lain. Pengembangan Kualitas Bidan sebagai salah satu ujung tombak penyiapan SDM sejak bayi tak luput dari kebedulian Yayasan Damandiri. Khusus untuk peningkatan kualitas bidan antara lain dilakukan kegiatan pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*). Selain itu para bidan berkesempatan mengambil kredit terkait peningkatan kualitas SDM maupun pelayanan mandiri.

Prof. Dr. Haryono Suyono, Wakil Ketua I Yayasan Damandiri yang juga Guru Besar Universitas Airlangga, menganggap perlu mempublikasikan tulisan-tulisan para peneliti itu. Alasannya, selama ini banyak hasil-hasil penelitian hanya berhenti di rak-rak perpustakaan.

Tentang target waktu meningkatnya HDI Indonesia, baik Prof Puruhito



maupun Prof Haryono sama-sama sulit untuk menentukan. “Logikanya, kalau jumlah penduduk Indonesia sekitar 170 juta, maka HDI ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masih tingginya angka kematian ibu, persoalan gizi, dan penghasilan.

“Pemerintah mana saja akan berpendapat sama. Upayanya adalah agar indeks ini meningkat jangan sampai menurun. Posisi HDI Indonesia yang berada di bawah ranking Vietnam, hendaknya dijadikan bahan renungan,” ungkap Prof. Puruhito.

Secara global, pada September 2000, dalam KTT Milenium yang diadakan di New York dan dihadiri 149 – 150 Kepala Negara dari 170 Pemimpin Dunia, telah menyepakati deklarasi Milenium Development Goals (MDGs) yang antara lain menurunkan komponen-komponen pokok dari sasaran itu sebesar 50% dari tahun 2015. “MDGs berisi agenda khusus yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan global pada tahun 2015. Jadi kita masih punya waktu 10 tahun untuk mengejar konsensus dunia ini,” tegas Prof Haryono Suyono.

Damandiri dan LIPM garap Program SMA Unggul

Program lain yang kemudian dikembangkan IIHD meramaikan kegiatan awal 2005 adalah Program Sekolah Unggul. SMA Unggul yang dikembangkan, mengandung dua pengertian. Yaitu, unggul karena bisa menghasilkan lulusan yang secara akademis mempunyai kemampuan tinggi dan nilai-nilai yang tinggi pada mata pelajaran yang dianggap penting untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Siswa tersebut dengan lancar bisa menyelesaikan kuliahnya dengan mulus dan berhasil.



Pengertian yang kedua adalah unggul karena setiap siswa yang lulus mempunyai kemampuan hidup mandiri dalam masyarakat karena mendapat latihan, pengalaman dan menguasai ketrampilan yang banyak gunanya untuk hidup mandiri. Keunggulan itu juga mempunyai akibat bahwa yang bersangkutan mempunyai “nilai jual” yang tinggi dalam masyarakat luas, kata Prof. Haryono Suyono pada pertemuan dengan SMA se Malang Raya di Malang, Jatim, 8 Januari 2005, dengan tema Lomba Kualitas SMA untuk Menjadi Unggul.

Sekolah-sekolah SMA yang berhasil merebut “juara”, yaitu memenuhi syarat-syarat siap menjadi SMA Berprestasi atau SMA Unggul akan diangkat sebagai “SMA Unggul” oleh berbagai Perguruan Tinggi anggota Jaringan Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia (LIPM). Pada tingkat awal setiap Perguruan Tinggi akan membina dan menjadi Orang Tua Angkat bagi sebuah “SMA Unggul”.

“Sekretariat LIPM di Surabaya dengan Yayasan Damandiri akan bekerja sama dengan jaringan Perguruan Tinggi mitranya untuk membantu SMA Unggul binaan tersebut dalam beberapa kegiatannya. Antara lain, bekerja sama menjadikan SMA Unggul itu bisa menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan akademis dan mempunyai keunggulan kemandirian,” ujar Haryono, yang juga Penasehat Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia (LIPM).

Rektor Universitas Merdeka (Unmer) Malang Drs Budi Siswanto, MSi berkata, menindaklanjuti hasil pertemuan 20 Kepala sekolah SMA dan Dinas Pendidikan se Malang Raya dengan Wakil Ketua I Yayasan Damandiri di Universitas Merdeka Malang, telah dilakukan kerja sama antara Yayasan Damandiri dengan empat perguruan tinggi yakni Unmer Malang, Universitas



Brawijaya (Unbraw), Universitas Muhammadiyah (Unmuh), Widya Gama dan didukung pula oleh dinas pendidikan se Malang Raya serta Bank Jatim untuk menumbuhkan jiwa wirausaha terhadap siswa-siswi SMA se-Malang Raya.

Metode yang digunakan adalah melakukan pendampingan kewirausahaan bagi siswa-siswi SMA. Untuk menentukan sekolah dan siswa-siswi sebagai calon wirausahawan muda diadakan kompetisi gabungan bagi siswa-siswi SMA se Malang Raya, yang meliputi bidang (1) bidang kompetisi ekonomi bisnis dan kewirausahaan diselenggarakan oleh Unmer; (2) bidang kompetisi seni dan budaya diselenggarakan oleh Unibraw; (3) bidang kompetisi Iptek oleh Unmuh, dan (4) bidang kompetisi olahraga oleh Widya Gama.

Dari hasil kompetisi gabungan diambil 20 sekolah terbaik. Dalam menetapkan calon siswa dengan mempertimbangkan bidang akademik,



ekstrakurikuler, minat bakat wirausaha serta kondisi perekonomian orang tua. Kemudian masing-masing perguruan tinggi akan mendampingi 5 sekolah dengan jumlah siswa 50 orang calon wirausahawan muda.

Masing-masing siswa ini akan memperoleh bantuan modal usaha dari Yayasan Damandiri sebesar Rp 500.000. “Kalau masing-masing siswa mendapat bantuan modal usaha Rp 500.000, dan tiap sekolah diambil 10 siswa terhadap 20 sekolah terbaik, maka akan tersalurkan dana sebesar Rp 100 juta sebagai modal usaha bagi calon wirausaha muda dari Yayasan Damandiri,” ucap Rektor Unmer Drs.Budi Siswanto Msi.

Dalam kompetisi gabungan terdaftar 206 peserta se Malang Raya, 115 peserta lomba ekonomi bisnis dan kewirausahaan, 82 tim peserta lomba olah raga, 9 tim lomba Iptek. Di kegiatan seleksi SMA Unggul ini peserta seni dan budaya juga sangat antusias. Pendampingan siswa-siswi SMA dalam wirausaha oleh empat Perguruan Tinggi ini merupakan *pilot project*, dengan harapan nantinya bisa menjadi model pendampingan kewirausahaan untuk siswa-siswi SMA oleh perguruan tinggi secara nasional.

IPB Kembangkan “Sekolah Tanpa Dinding”

Langkah awal menarik dalam pengembangan Sekolah Unggul di “Wilayah Barat” kerjasama Yayasan Damandiri dan Institut Teknologi Bogor adalah rintisan “Sekolah Tanpa Dinding”. Ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) IPB, Bogor, DR Ir. Illah Saillah MSc menjelaskan yang dimaksud dengan Sekolah Tanpa Dinding adalah ruang sekolah terbuka terhadap sesuatu pengetahuan yang akan meningkatkan *live skill*.



Dengan dukungan dana dari Yayasan Damandiri, IPB memfasilitasi untuk meningkatkan skill siswa utamanya siswa perempuan dari keluarga kurang mampu. Seleksi siswa penerima program ini dilakukan oleh sekolah masing-masing.

Dr. Ir. Illah Saillah MSc, Kepala Pusat Pengembangan SDM IPB Bogor menyebutkan bahwa persyaratan untuk program ini siswa harus berminat untuk wirausaha. Mereka harus memiliki kemauan dulu, baru yang ketiganya diberikan kriteria .

Setelah itu Panitia yang ditunjuk khusus menangani ini menetapkan dua sekolah untuk Tingkat Kota Bogor dan dua untuk Tingkat Kabupaten Bogor.

Setelah program tersebut Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia



(P2SDM) IPB akan melangkah memberikan perhatian kepada para guru. Ditambahkan, gurunya juga perlu ditingkatkan kualitasnya, namun peningkatannya tidak dalam bentuk pelatihan. Bentuk pelatihan biasanya dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan dan kadang-kadang dia juga tidak tahu kemampuan apa yang ingin ditingkatkan, tambah DR.Illah Saillah.

Untuk itu Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) IPB akan memberi keleluasaan “*Study Visit*”. karena Ibu-Bapak guru tidak mau disebut magang. “Magang” itu seperti anak sekolah magang di kantor-kantor dan dia harus bekerja. Oleh karena itu program kerjasama Damandiri- IPB dan Perbankan yang ditunjuk menggunakan nama *Study Visit*.

Dr. Illah menjelaskan dalam hal ini tugas guru peserta program adalah mengunjungi sekolah-sekolah, kemudian mereka ikut berinteraksi dalam proses belajar mengajar yang ada di sekolah yang dikunjungi.

Dalam “*Study Visit*” peserta akan dapat mengamati dan mencermati apa yang terjadi. disana, Selanjutnya peserta mengkaji diri tentang apa yang diinginkan dan apa saja yang sebenarnya harus ditingkatkan. Apakah metode pelajarannya, apakah materinya, apakah ilustrasi, apakah komunikasi antara guru dengan murid dan berbagai temuan kelebihan lain yang “apik” untuk dikembangkan. Para peserta study visit juga diberi tugas



untuk mendekati murid disana., agar mereka juga mengetahui, bagaimana citra guru dalam pandangan murid-muridnya sekaligus mengetahui pergeseran citra yang terjadi.

Untuk tahap awal peserta *Study Visit* yang ditempat lain dikenal sebagai “Sekolah Magang” diselenggarakan di sekolah yang berada di kota dan ada yang diluar kota. Pilihan, tergantung kebutuhan masing-masing. Program itu semuanya telah berjalan dan hampir selesai yaitu di SMAN 7, SMAN Ciampea I. Study visit juga dilakuan di sekolah swasta yaitu di SMA Pandu, Kabupaten Bogor dan SMA Rimba Madia di Kota Bogor.

Peduli Peningkatan Kualitas Bidan

Sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi kesepakatan MDG's, Indonesia terikat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan seluruh isi kesepakatannya. Lebih dari itu nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Milenium Development Goals (MDG's) merupakan arah pembangunan global dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.

Walaupun dalam MDG's isu pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tidak disebutkan secara eksplisit, namun banyak studi membuktikan bahwa MDG's tidak mungkin dicapai jika persoalan dasar kependudukan tidak ditangani dengan baik.



Upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan tidak dapat dicapai jika masalah kependudukan dan kesehatan reproduksi tidak ditangani dengan baik. Hal ini berarti diperlukan upaya yang keras untuk meningkatkan hak asasi perempuan, investasi pendidikan dan keluarga berencana. Menjawab tantangan Era Global, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) segera menyingsingkan lengan baju, menyiagakan anggotanya dengan menggelar seminar di wilayah binaan masing-masing.

Di Jawa Tengah, IBI Jateng menggelar seminar dengan tema “Kesiapan Bidan Menghadapi Era Global melalui Program Bidan Delima”, diselenggarakan tanggal 19 Mei 2004 di kota Semarang, Jawa Tengah. Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof DR Haryono Suyono selaku pembicara mengangkat topik “Pelayanan KB Mandiri untuk bidan praktek swasta”.

Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Tengah Hj Gunarmi Hadi mengungkapkan, berdasarkan komitmen global ICPD 2005 untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) maka perlu ditingkatkan standar dalam menjaga mutu serta kepuasan yang mengacu pada semua persyaratan kualitas pelayanan dan peralatan kesehatan, agar dapat memenuhi keinginan masyarakat.

Bidan praktek swasta yang mampu memberikan pelayanan berkualitas dalam bidang KB dan kesehatan Reproduksi, bersahabat dan peduli terhadap kepentingan pelanggan serta memenuhi dan bahkan melebihi harapan pelanggan, dinamakan Bidan Delima. “Sejumlah persyaratan untuk mencapai Bidan Delima bukanlah hal yang mudah untuk dicapai seorang bidan praktek swasta di daerah pedalaman, khususnya karesidenan Semarang yang begitu luas,” kata Hj Gunarmi Hadi.



Belum lagi menghadapi era globalisasi saat ini yang semakin membuat persaingan sangat ketat dalam segala hal. Itu sebabnya, lanjut Hj Gunarmi Hadi, sangatlah tepat Yayasan Damandiri yang bekerja sama dengan Yayasan INDRA, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan BPR Nusamba menawarkan Program Pemberdayaan Keluarga melalui Penyaluran Kredit Bidan Mandiri,” paparnya.

Program ini adalah suatu upaya dan kegiatan pembinaan yang disertai dengan penyediaan kredit modal kerja berupa obat-obat bebas maupun obat-obat kontrasepsi yang ditujukan kepada Bidan praktek swasta sehingga mampu memberikan pelayanan KB mandiri, terutama pada keluarga yang relatif kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan obat-obat dan alat kontrasepsi.

Sejumlah peserta menyambut hangat upaya Yayasan Damandiri tersebut. “Diadakannya kredit bergulir kepada para bidan di sini, tentunya sangat membantu profesi bidan yang berada di sekitar kota maupun di desa, yang sekarang memang sangat membutuhkan modal kerja untuk kelangsungan dan kesejahteraan pelayanan bidan desa,” ujar salah satu peserta seminar.

Di Jawa Timur Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jawa Timur bekerjasama dengan UNAIR menggelar seminar untuk memasyarakatkan Gerakan Bidan Sejahtera yang mandiri.

Wakil Ketua I Yayasan Damandiri yang mantan Menko Kesra ini mengingatkan bahwa dari 70.000 bidan yang sudah mulai bergabung dengan posyandu dan Polindes di desa-desa, sekarang tinggal 22.000. Sementara yang lainnya setelah kawin dan alasan lainnya telah beralih profesi. Ada yang menjadi



istri kepala desa, istri camat, istri pedagang, sehingga melupakan ilmu kebidanan dan pertolongan untuk ibu hamil dan melahirkan. “Apabila kita ingin bidang kesehatan dan KB maju, pelayanan ibu sehat ini harus tetap dijadikan profesi kapanpun dimanapun kita berada,” tegas Prof. Haryono Suyono.

Ironisnya, pelayanan pemerintah berupa obat-obatan dan alat kontrasepsi mulai tahun 2004 hanya antara 20 – 30 %. Artinya, antara 70 – 80 % harus dilayani masyarakat sendiri atau swasta. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi agar bidan dengan kerjasama tim dokter dan akademisi pendidikan dapat meningkatkan mutu bidan sehingga kesehatan ibu dan anak dapat dideteksi secara dini. Kalau bidan tidak bisa melayani di tempat praktek atau di posyandu atau di polindes dapat diteruskan kepada para dokter.

Menurut Prof. Haryono seiring perkembangan era teknologi dan globalisasi saat ini, peran bidan menjadi ujung tombak kelangsungan hidup matinya seorang anak manusia yang lahir ke dunia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 66% persalinan, 93% kunjungan antenatal dan 80 % dari pelayanan keluarga berencana dilakukan oleh bidan.

Bidan sangat berperan dalam pencapaian 53 % prevalensi pemakaian kontrasepsi. Apalagi, 58% pelayanan kontrasepsi suntik dilakukan oleh bidan praktek swasta dan 25% pemakai kontrasepsi Pil, IUD dan implant dilayani oleh bidan praktek swasta.

Di sisi lain, sukses yang telah diraih selama ini menimbulkan tantangan baru bersama dengan kemajuan pembangunan di tanah air. Kesejahteraan yang semakin meningkat disertai dengan tingkat pendidikan masyarakat akan menimbulkan tuntutan kualitas pelayanan.



Dalam upaya peningkatan kualitas bidan serta peningkatan mutu pelayanan utamanya bagi keluarga kurang mampu Yayasan Damandiri bekerjasama dengan mitra kerja seperti kalangan perbankan, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Yayasan Indra dan organisasi kemasyarakatan dalam hal ini Ikatan Bidan Indonesia berusaha membantu dengan mengembangkan Gerakan Bidan Sejahtera yang mandiri. Gerakan ini memerlukan pelayanan dengan tempat dan peralatan memadai. “Untuk itu, melalui bank-bank setempat, misalnya Bank BPD atau Bank Bukopin telah disepakati untuk memberikan pelayanan kredit dengan prosedur komersial yang disederhanakan,” jelas Haryono

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai organisasi profesi yang sangat peduli pada anggotanya serta sensitif pada masalah kesehatan yang ada di negara ini senantiasa memperhatikan tingkat profesionalisme para bidan. Berbagai upaya telah dilakukan IBI dengan melakukan kegiatan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pemberian pelayanan serta kelengkapan sarana sesuai standar.

Dengan kekuatan organisasi pada setiap jenjang kepengurusan, hampir setiap cabang IBI telah mempunyai kantor sekretariat tempat melakukan aktifitas yang merupakan center pembinaan anggota, bahkan juga tempat pelayanan milik organisasi sebagai tempat meningkatkan ketrampilan anggota melalui program magang dan sekaligus merupakan tempat usaha yang berbadan hukum dengan nama Yayasan Buah Delima.

Melalui kegiatan yayasan ini, IBI melengkapi kebutuhan para bidan baik berupa sarana pelayanan termasuk obat dan alat kontrasepsi maupun berupa dana untuk meningkatkan tempat pelayanan.



Di sela kesibukan menempuh pendidikan formal tingkat akademi yang merupakan standar minimal pendidikan bidan atau lebih atas lagi, para pengurus masih menyempatkan melakukan pembinaan di setiap tingkat kepengurusan.

Di tingkat provinsi diberikan kepada pengurus cabang dengan muatan kebijakan-kebijakan organisasi, pengembangan pengetahuan baru yang akan diteruskan kepada anggota di tingkat cabang dan ranting sebagai upaya pemberdayaan pengurus.

IBI Provinsi Jawa Timur, boleh berbangga hati karena pihak rektorat Universitas Airlangga bakal menyediakan peluang bagi bidan di Jatim untuk mengembangkan pengetahuannya hingga jenjang S1 di kampus Unair. “Kemungkinan besar, bidan-bidan yang beruntung nanti akan mendapat korting SPP-nya dari Unair,” cetus Prof Dr H Haryono Suyono Guru Besar Universitas Airlangga, saat berbicara dalam seminar Peningkatan Kualitas Bidan di kampus Unair dalam rangka memperingati 50 Tahun Unair, yang terselenggara atas kerjasama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga, Jawa Timur.

Ucapan Wakil Ketua I Yayasan Damandiri cukup beralasan, karena sebelumnya telah dilakukan pendekatan dengan banyak pihak, khususnya pihak rektorat. Dengan kata lain, Universitas Airlangga memang telah siap mengangkat para bidan se Jatim menjadi sarjana melalui program S1-nya. Seminar tersebut dihadiri Pembantu Rektor I Unair, Prof Dr Fasikhul Ihsan, Sukaemi Sukir, SPd, - Ketua IBI provinsi Jatim dan Prof Muhammad Amin - Direktur Program Pascasarjana Unair. Selain itu jajaran pengurus IBI se-Jatim memenuhi auditorium Fakultas Kedokteran UNAIR.



Ketua IBI Jatim Sukaemi Sukir, Spd berkata selain mengupayakan para bidan yang tergabung dalam IBI memperoleh tingkat pendidikan memadai, IBI juga melakukan kegiatan berupa seminar pendidikan berkelanjutan, pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi (menggunakan standar WHO) yang telah dan sedang dilaksanakan di 75 % cabang, bahkan ada 4 kabupaten yang 100 % bidannya telah dilatih APN. Untuk mempertahankan kinerja pelayanan sesuai standar, IBI pun mempunyai program *Peer Review* yang sedang dan telah dilaksanakan di cabang cabang.

Mengantisipasi penerapan sistem legislasi dan lisensi oleh pemerintah melalui proses penilaian dan pemantauan terhadap pelayanan bidan, maka IBI bekerjasama dengan STARH, BKKBN dan Dep.Kes telah memulai program peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan WHO. Program ini ditujukan kepada semua bidan praktek swasta dan dinamakan Bidan Delima, suatu merk dagang yang punya standar sudah ditentukan dan mempunyai keunggulan, kekhususan berkualitas tinggi, mempunyai nilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.

Wakil Ketua I Yayasan Damandiri mengingatkan di era Otonomi Daerah, perlu dikembangkan strategi pemberdayaan yang mandiri untuk meningkatkan mutu keluarga, perempuan, anak-anak dan remaja di dalam proses pemberdayaan ibu sehat, keluarga sehat, keluarga yang beruntung, bekerja dan membangun.

“Strategi ini bukan sekedar wacana, tetapi pada perubahan tingkah laku,” tegas Prof Haryono seraya menambahkan, “strategi yang perlu kita segarkan kembali adalah komitmen yang tinggi melindungi ibu-ibu dan anak-anak pemegang masa depan bangsa. Targetnya adalah dengan mengukur



makin tingginya mutu penduduk Indonesia atas dasar *human development index*.”

Pascasarjana Unair saat ini sedang menyiapkan suatu jaringan di sepuluh kota dan kabupaten sebagai payung proyek pertama, termasuk Surabaya, Malang dan sekitarnya. Untuk meningkatkan mutu dan jaminan para bidan ini akan dilakukan pertemuan sekitar dua atau tiga bulan sekali.

Diharapkan, akan ada kerjasama dengan bank pembangunan daerah agar para bidan dapat menjadi anggota dan penerima kartu bidan mandiri, sehingga para bidan mudah menerima kartu kredit dari bank Jawa Timur untuk menolong para akseptor yang mungkin tidak bisa membayar kontan harga obat suntikan. “Obat suntikan 3 bulan dipakai sekali kalau bayar 3 bulan hanya pada waktu disuntik itu mahal, bisa dicicil seminggu sekali atau sebulan sekali,” saran Prof. Haryono Suyono didepan `peserta forum seminar yang saat itu hadir pula beberapa pengurus BPD Jatim.

Usulan lainnya, akan ada pelatihan bidan junior secara tersendiri. “Kalau dalam dua tahun sekali, bidan delima mengambil bidan senior, maka bidan junior akan kita latih juga. Sehingga ada semacam kerjasama yang erat, yang intinya adalah memberikan kesempatan sebanyak mungkin agar pasangan ibu yang ada dapat dibantu.

Oleh karena itu sejalan dengan penyediaan pelayanan yang disediakan Bank Jatim, Yayasan Damandiri menyediakan kontrasepsi mandiri. Dijadwalkan di setiap desa minimal ada 1 bidan mandiri.”

Seminar yang dihadiri 230 pengurus IBI se-Jawa Timur dan Badan



Pusat statistik (BPS) dari 15 cabang ini diharapkan dapat menambah pengayaan dari kegiatan dan program yang telah ada, sehingga memperkuat kemandirian dalam langkah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.

IBI Jawa Tengah Luncurkan 60 Bidan Delima

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terus berpacu untuk menjadikan bidan semakin profesional. Karenanya, IBI Jawa Tengah mulai awal tahun 2005, tepatnya 6 Januari 2005 meluncurkan "Bidan Delima", sebagai upaya nyata dalam "melahirkan" bidan berkualitas dalam menyelamatkan kaum ibu hamil dan melahirkan dan anak yang dilahirkannya. Tercatat, enam puluh bidan sebagai Bidan Delima. Peluncuran Bidan Delima di Semarang, Jawa Tengah, ini sebagai yang pertama, yang diharapkan akan dilanjutkan di provinsi lain di Indonesia.





Gubernur Jawa Tengah H Mardiyanto menyambut baik peluncuran Bidan Delima. Kehadiran Bidan Delima di tengah-tengah masyarakat diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (Kespro) dan keluarga berencana (KB). “Hendaknya dipahami, bahwa primanya derajat kesehatan ibu dan anak sangat menentukan bagi suksesnya pembangunan bangsa dan negara di masa depan,” kata H.Mardiyanto, di depan para pengurus dan anggota IBI Jateng, Dirut Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, dan rombongan Yayasan Damandiri.

Gubernur berharap, IBI dapat mencermati Program Kredit Bidan Sejahtera, yang merupakan kerja sama antara pengurus IBI Jateng dengan BPD Jateng dan Yayasan Damandiri. Dengan mengkaji kerja sama yang telah berjalan tersebut diharapkan program Bidan Delima dapat berjalan lebih baik serta membuahkan daya guna dan hasil guna yang optimal.

“Kepada anggota Bidan Delima selaku pengguna kredit saya berpesan agar bantuan pinjaman ini didayagunakan seoptimal mungkin bagi keperluan peningkatan profesionalitas bidan. Misalnya untuk biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan, atau untuk membangun klinik bersalin, membeli alat kebidanan dan sebagainya, yang bermuara pada peningkatan mutu pelayanan, perluasan jangkauan dan percepatan mobilitas pelayanan kesehatan,” harap Gubernur H. Mardiyanto.

Wakil Ketua I Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono yang mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memahami keterbatasan pemerintah, maka sejak beberapa waktu lalu Yayasan Damandiri berusaha membantu dengan mengembangkan Gerakan Bidan Sejahtera yang mandiri.



Di Jawa Tengah, lanjut Haryono, pengurus IBI Provinsi bertindak sebagai fasilitator dan secara umum menjadi salah satu pemegang agunan untuk menjamin bidan yang ingin menjadi nasabah agar mendapat kemudahan dari bank yang dipilihnya. Para bidan sendiri harus bisa meyakinkan bank pilihannya bahwa yang bersangkutan bisa membayar cicilan dan bunga pinjaman tepat waktu agar kelancaran nasabah lain dapat dijamin.

Berbeda dengan bantuan hibah, dukungan kredit bidan ini mengandung kewajiban mencicil dan membayar bunga tepat waktu, karena dana yang dibayarkan akan digulirkan untuk peminat lain yang jumlahnya relatif banyak. “Dengan cara bergulir tersebut biaya untuk modal dana yang dapat dipinjam menjadi relatif murah dan dapat terjangkau”.

Komitment Kuat Jamin Kredit Anggota IBI

Untuk IBI Kab Karanganyar, upaya peningkatan kualitas bidan memperoleh dukungan penuh dari Bupati. Bahkan dalam hal memperoleh kredit Bidan Mandiri Bupati Karanganyar Rina Iriani Spd. M.Hum bersedia menjaminnya.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Kabupaten Karanganyar Suharti SKM selanjutnya berkata Ibu Bupati sangat mengetahui pekerjaan bidan yang menangani gizi buruk, itu salah satu pekerjaan dinas. Sementara pekerjaan di luar dinas itu membantu persalinan guna membantu menurunkan angka kematian ibu dan anak. Karena untuk bidan-bidan yang baru itu tempat, dana, sarana dan prasarana masih sangat terbatas. Sehingga Ibu Bupati bisa membantu anggota bidan kami sama dengan BPR Bank



Pasar ada dana Yayasan Damandiri yang ditawarkan untuk pemberdayaan bidan di Karanganyar.

Kami sepakat akan dipinjami kredit dengan dana lunak. Kredit tersebut sangat bermanfaat untuk mengelola tempat yang bersih dan sehat, peralatan yang lengkap, untuk imunisasi serta keperluan penting lainnya terutama ibu dan anak.

Setelah melalui pertemuan-pertemuan yang cukup intens antara pemda, Bank Pasar dan IBI Karanganyar, dan disepakati untuk pinjaman tersebut bidan harus melengkapi persyaratan SPB (Sertifikat Praktek Bidan) asli, foto copy KTP, mengisi formulir dan rekomendasi dari Ketua IBI Cabang. Sehari langsung cair. Jadi prosesnya mudah sekali, hal ini berkat agunan Ibu Bupati yang menanggung.

Meskipun kita sudah dipercaya Bupati, tetapi kita tetap tanggung jawab dengan anggota. Jadi mengenai tanggungan antar bidan sendiri melalui sistem kelompok per Puskesmas. Kalau per kelompok paling banyak biasa 10 orang. Yang mengelola itu ketuanya, yaitu ketua KIA. Membayarnya setiap bulan dikoordinir ketua. Kalau ada yang terlambat mengansur yang menegur itu ketuanya. Setelah dari ketuanya disetor ke Ketua cabang IBI.

Bidan Karanganyar juga sudah menjalankan program gerakan sayang ibu (GSI). Untuk bidan di desa itu harus ada kriteria ambulan desa. Maksudnya, dari polindes yang sangat sederhana menolong persalinan. Pertama bidan itu sudah memiliki riwayat persalinan yang resiko tinggi kira-kira resiko-resiko apa saja sudah terdata, kemudian untuk pertolongan pasien selanjutnya butuh kecepatan untuk dirujuk itu haru ada ambulan desa.



Kalau dulu menggunakan mobil kecamatan yang berwarna oranye, tetapi itu hanya untuk satu kecamatan. Maka ada kesepakatan tiap bidan desa harus mempunyai satu ambulan. Daan desa tetangga pun bisa menggunakan asal sduah memberi informasi dan pemberitahuan sbelumnya. Kalau tidak ada mobil bisa menggunakan kendaraan sepeda motor.

Namun sekarang sudah banyak bidan memiliki kendaraan sendiri. Kendaraannya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ambulan.

Jumlah bidan yang ada di Karanganyar 250 orang. Dari jumlah tersebut 238 diantaranya mengambil kredit dengan nilai Rp 1.202.782.650. Sedang perawat yang memanfaatkan kredit sebanyak Rp.105 orang dengan kredit sebesar Rp 46.874.900. Mereka memperoleh paket pinjaman dari dana Yayasan Damandiri melalui PD.Bank Pasar Daerah Karanganyar masing-masing sebesar Rp 10 juta. Selain itu bidan-bidan di Jawa Tengah juga memperoleh dukungan bantuan dari Gubernur, masing-masing untuk setiap desa memperoleh Rp 10 juta.

Yayasan Damandiri Ajak Bidan Mandiri

Pembangunan dibidang kesehatan dan keluarga berencana yang telah diselenggarakan secara nasional telah mencapai hasil yang mengembirakan. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat telah memberikan pengetahuan dan sikap positif yang disertai dengan wujud praktek kehidupan di bidang kesehatan dan KB pemakaian kontrasepsi secara luas di masyarakat. Pemakaian kontrasepsi sudah dirasakan sebagai kebutuhan rutin dalam kehidupan para peserta keluarga berencana secara mandiri. Untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsi, para peserta KB tidak lagi hanya menggantungkan



pelayanan dari Pemerintah tetapi juga mencari pelayanan mandiri dari Bidan dan Dokter praktek swasta.

Tingkat kesertaan KB mandiri yang mendapat pelayanan dari Bidan praktek swasta cenderung terus meningkat setiap tahun. Disisi lain jumlah Bidan Desa sebagai potensi memberikan pelayanan keluarga berencana cenderung berkurang dan kemampuan Bidan praktek swasta yang telah ada belum optimal karena kurangnya pembinaan secara efektif.

Krisis multi dimensi terus berkepanjangan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Hal ini tercermin dengan kecenderungan bertambahnya jumlah keluarga Pra Sejahtera atau keluarga kurang mampu. Dengan kondisi demikian dikhawatirkan tingkat kesertaan KB mandiri akan menurun akibat kurangnya pembinaan dan kemampuan pelayanan dari Bidan secara mandiri

Dalam menjawab tantangan tersebut Yayasan Damandiri bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Damai Sejahtera - Yayasan INDRA (sebagai lembaga pengkajian dan advokasi yang mempunyai visi sebagai mitra yang peduli dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) serta beberapa Bank mitra kerja seperti BPD, BPR NUSAMBA, PT.Bank BUKOPIN, PD. Bank Pasar Karang Anyar dan lain-lain dengan di dukung oleh beberapa Produsen obat dan kontrasepsi, mengembangkan suatu Program Pemberdayaan Keluarga melalui Penyaluran Kredit Bidan Mandiri.

Program ini adalah suatu upaya dan kegiatan pembinaan yang disertai dengan penyediaan kredit modal kerja berupa obat-obat bebas maupun obat-obat kontrasepsi yang ditujukan kepada Bidan praktek swasta sehingga



mampu memberikan pelayanan KB mandiri terutama pada keluarga yang relatif kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan obat-obat dan alat kontrasepsi

Sebagai wujud dari tekad dan upaya bersama guna meningkatkan usaha tersebut maka telah ditandatangani kesepakatan kerjasama antara berbagai pihak yang merupakan suatu sinergi untuk memberikan pendampingan dan pembinaan yang disertai dengan upaya advokasi dan promosi serta fasilitas kredit berupa barang/obat secara berkesinambungan.

Melalui program dan upaya bersama ini diharapkan dapat memperluas cakupan sasaran guna meningkatkan kesertaan KB mandiri yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemberdayaan keluarga.

Tujuan Umum kegiatan ini adalah: Meningkatkan kelangsungan pemakaian kontrasepsi peserta KB mandiri melalui pembinaan dan pelayanan Bidan praktek swasta yang diberikan kesempatan mendapat kredit untuk menambah datam pengadaan sarana dan kontrasepsi mandiri. Sedangkan tujuan khususnya meliputi: Memberikan fasilitas kredit kepada Bidan praktek swasta untuk menambah kemampuan penyediaan/pengadaan kontrasepsi mandiri dan atau peralatan kesehatan lainnya; Mengembangkan dan membina kompetensi Bidan praktek swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan KB mandiri ; Membantu menyediakan obat dan kontrasepsi mandiri serta peralatan kesehatan lainnya dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu dengan harga yang terjangkau; dan Mendorong dan memperluas partisipasi serta cakupan Bidan praktek swasta dalam pelayanan KB mandiri.

Sasaran dari Program Pemberdayaan Keluarga melalui Penyaluran Kredit Bidan Mandiri ini adalah para peserta keluarga berencana mandiri



terutama dari keluarga kurang mampu- Sedangkan sasaran antara dari program ini adalah Bidan praktek swasta dan tenaga kesehatan lainnya serta Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam pembangunan keluarga terutama di Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan wilayah penyaluran kredit Bidan Mandiri pada dasarnya meliputi seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan serta kesiapan organisasi dan lembaga pelaksana (*stakeholder*). Tahapan dan prioritas akan didahulukan pada wilayah/daerah yang tingkat peserta KB Mandiri-nya tinggi.

Kredit yang disalurkan kepada Bidan-bidan baik secara perorangan maupun kelompok oleh Bank Pelaksana antara lain didasarkan pada ketentuan sbb.: Sumber dana kredit berasal dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri yang ditempatkan pada Bank Pelaksana dalam bentuk Deposito Berjangka; Bank Pelaksana bertanggung jawab atas penyaluran dan pengembalian kredit (*executing bank*); Jenis Kredit adalah kredit modal kerja untuk pembelian/pengadaan berupa obat-obat bebas maupun obat/alat kontrasepsi dan alat kesehatan lainnya; Setting Kredit adalah angsuran bulanan / pokok dan bunga (*installment*); Plafond Kredit adalah senilai dengan harga beli barang (obat-obatan dan alat kontrasepsi) minimal Rp 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) untuk tiap Bidan.

Yayasan Damandiri Gulirkan Program ke Tingkat Desa

Kiprah Yayasan Damandiri dalam mengembangkan jaringan pelayanan KB mandiri di tingkat pedesaan, terus bergulir. Di Jawa Tengah yayasan Damandiri telah mengucurkan dana ke BPD Jawa Tengah sebesar



Rp 4 miliar. Khusus untuk kabupaten Sragen Damandiri mengucurkan dana ke BPD Jateng Cabang Sragen sebesar Rp 300 juta.

Dalam penandatanganan penyaluran kredit Bidan Sejahtera di Pendopo Kabupaten Sragen, Yayasan Damandiri melalui BPD Jateng cabang Sragen secara simbolis telah menyerahkan kredit kepada empat bidan yang mewakili desa masing-masing di Kabupaten Sragen. Mereka yang menerima kredit bidan sejahtera adalah Noviardhini, Anik Suryani, Achlisani Takwin, Ernawati dan Bidan Andayani.

Di hadapan Bidan se-Kabupaten Sragen yang disaksikan Bupati Sragen H Untung Wiyono, Wakil BPD Jateng Basuki Sri Hartono, Deputy Gubernur BI Maulana Ibrahim, Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, kegiatan yang baru saja dilakukan ini akan menjadi embrio dari kegiatan besar di masa depan, di mana kemudahan dan fasilitas swasta yang makin baik dimungkinkan bagi peserta KB untuk tidak tergantung kepada pelayanan KB secara cuma-cuma yang makin langka belakangan ini.

Kredit yang disalurkan ke praktek bidan swasta tidak melulu dalam bentuk kredit produk alat kontrasepsi, tetapi bisa berupa kredit modal kerja untuk pembelian obat bebas dalam upaya mendukung usahanya. Batas kredit senilai harga beli obat-obatan dan alat kontrasepsi minimal Rp 500 ribu dan maksimal Rp 10 juta per bidan dengan bunga pinjaman yang ringan.

Gunarni Hadi, Ketua IBI Jawa Tengah berkata, kerja sama yang selama ini terjalin antara IBI, Yayasan Damandiri dan perbankan memberikan banyak keuntungan untuk meningkatkan mutu bidan. Selama ini bantuan dimanfaatkan bagi pelatihan, menambah pelayanan dan obat



serta alat kontrasepsi. “Hanya saja bantuan yang ada belum mencukupi untuk seluruh anggota IBI,” paparnya sambil menambahkan, anggota IBI mengharapkan bantuan yang sama untuk seluruh cabang yang ada di 35 kabupaten/kota.

Para bidan dapat memberikan pelayanan KB Mandiri, selain itu mereka dapat mengikuti program latihan dan sistem akreditasi yang dimaksudkan untuk memperbarui ilmu dan ketrampilan mereka. Selain itu bidan dituntut untuk mampu mengembangkan diri guna memasarkan programnya di masyarakat.

Melalui kerja sama dengan Damandiri dan lembaga keuangan perbankan yang menjadi mitra, bidan yang berminat disediakan kredit khusus untuk memberdayakan mereka. Selain pemberdayaan mereka memiliki kesempatan memperoleh kredit untuk mengikuti latihan ketrampilan, memperbaiki tempat praktek dan menyediakan obat dan alat kontrasepsi.

“Inti program tersebut adalah memberdayakan sumberdaya manusia bidan untuk pelayanan KB dan kesehatan yang bermutu, melalui pembelajaran dan peningkatan mutu bidan dan wirausaha yang bersifat mandiri,” papar Gunarni Hadi.

Di Sragen terdapat 380 bidan dan mendapat kredit untuk meningkatkan kualitas bidan. Hal itu dimaksudkan guna meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi kehidupan manusia.

Spesialisasi Posyandu

Lain dengan di UNAIR Jawa Timur yang meluncurkan Gerakan Bidan



Sejahtera atau di Semarang Jawa Tengah dengan “Bidan Delima”nya., untuk “Wilayah Barat” dalam upaya Peningkatan Mutu Manusia (*Human Development*) kerjasama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Yayasan Damandiri menggelar seminar bertema “ Revitalisasi Posyandu dan Peran Bidan Sebagai Agen Pengembangan SDM Menuju Tujuan Pembangunan Millennium”.

Seminar ini menandai gebrakan awal Gerakan Terpadu Peningkatan Kualitas Manusia di “Wilayah Barat”. Seminar sehari dalam rangka ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke 54 di Bogor, merupakan kerja sama antara LPPM Intitut Pertanian Bogor (IPB), IBI Bogor, Yayasan Damandiri



dan Yayasan Indra.

Tampil sebagai pembicara Prof DR H Haryono Suyono, Walikota Bogor diwakili Sekda Dody Rosadi, MM, dan Dr Candra dari IPB. Hadir pada seminar tersebut antara lain, Ka Dinkes Kota Bogor, Ketua IBI Bogor Hj Diartiningsih, Ketua P2SDM-LPPM IPB Prof DR Ir Hj Illah Saila, Msc, Bank Bukopin, serta para bidan kota Bogor dan sekitarnya.

Untuk merangsang bangkitnya masyarakat yang sehat dan sejahtera, harus secara sungguh-sungguh diberikan dukungan pemberdayaan kepada para bidan yang ada di desa, secara teratur serta diantar untuk tetap dicintai oleh masyarakatnya. Pemerintah diharapkan bisa memberikan fasilitasi yang sungguh-sungguh agar kesadaran masyarakat untuk membawa dan memeriksakan ibu hamil dan melahirkan serta anak-anaknya kepada para bidan yang ada di desanya berjalan dengan lancar dan para ibu tidak takut pergi ke bidan.

Guna mendukung maksud tersebut, telah ada kesepakatan untuk menjadikan kota Bogor sebagai salah satu daerah pilihan dari LPPM IPB, Yayasan Damandiri dan IBI sebagai pilot revitalisasi gerakan kesehatan khususnya posyandu. “Lebih khusus lagi dengan usaha-usaha bidan praktek swasta sebagai upaya meningkatkan mutu bidan yang dilakukan melalui pendidikan dan penambahan pengetahuan secara reguler,” jelas Prof. Dr. Haryono Suyono.

Ketua IBI Kota Bogor Hj Diartiningsih menyatakan siap untuk bekerja sama. Dijelaskan IBI Bogor, beranggotakan lebih 200 bidan, terdiri bidan praktek swasta sekitar 138, sisanya untuk tahun 2005 ini diharapkan bisa praktek. Pihaknya saat ini sedang menggalakkan semua bidan praktek swasta menjadi Bidan Delima, dsesuai harapan Wakil Ketua I Yayasan Damandiri,



yakni meningkatkan kualitas pelayanan bidan praktek swasta tersebut. “Sekarang ini pendidikan bidan ada yang 3 tahun dan diharapkan meningkat dalam hal kualitas, dan sekarang ini bidan tidak tetap dialokasikan ke daerah terpencil sebagai wajib dinas sebelum pengangkatan,” tambah Diartiningsih.

Prof. Dr. Haryono Suyono berkata IBI Bogor, mempunyai pertemuan bulanan dan tiga bulanan. Sedangkan IPB mempunyai ahli-ahli gizi yang bisa menjadikan bidan ujung tombak dari pembangunan kemampuan wira usaha, kesehatan dan merangsang pendidikan anak-anak yang selama ini selalu menjadi pasien atau teman dekat dari IBI. Hal demikian secara tidak langsung akan menjadi motor dari penggerak SDM yang bermutu di Bogor ini.

“Pengalaman ini akan diramu IPB menjadi semacam hasil-hasil





penelitian, buku dan sebagainya untuk kemudian disebar luaskan keseluruh pelosok tanah air, sedangkan Yayasan Damandiri bekerja dari belakang. Mulai awal 2006 akan diselenggarakan “road show” keliling dari sekolah ke sekolah, dari posyandu ke posyandu,” imbuh Wakil Ketua I Yayasan Damandiri.

Wakil Ketua I Yayasan Damandiri menyadari memang tidak semua wilayah di Indonesia bisa *tercover*, tetapi dengan semangat yang datang dari Bogor ini dengan bantuan pers bisa disebarluaskan kewilayah lain menjadi suatu semangat nasional. Karena yang akan dikerjakan tidak akan disembunyikan, akan dibuka seluas-luasnya agar IBI lain, universitas lain, daerah lain dapat meniru dan manfaatnya untuk rakyat Indonesia. “Sebagai tolok ukur keberhasilan adalah partisipasi, program ini harus diikuti oleh sebanyak-banyaknya bidan, perguruan tinggi dan yang lebih penting lagi oleh sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia.”

Sedangkan Ketua P2SDM-LPPM IPB Prof. D. Ir. Hj. Illah Saila, MSc, menyatakan IPB berkeinginan berbagi ilmu pengetahuan dengan bidan, di mana bidan tidak hanya untuk mempunyai pengetahuan dari sisi kesehatan atau kebidanan, tetapi ada suatu jalan untuk berjejaring dengan para kliennya melalui berbagai cara. Misalnya, memberikan pengetahuan lain tentang peningkatan ekonomi atau pendapatan dari keluarga itu sendiri.

Menurut Prof. Hj. Illah Saila wawasan lain harus diberikan kepada bidan. Yang sangat dekat dengan IPB adalah pertanian. Banyak sekali pertanian yang bisa dilakukan di perkotaan juga dilakukan oleh keluarga. Sampai saat ini pertanian Indonesia belum maksimal karena sebenarnya kalau kita berbicara pertanian sekarang tidak berbicara pertanian hulu tapi kehilirnya disisi pengolahan itu banyak sekali yang bisa dilakukan.



Dalam menghidupkan kembali fungsi bidan di masyarakat, P2SDM IPB, juga telah melakukan kegiatan seminar dengan topik “Spesialisasi Posyandu” .

Awal Desember 2005, seminar revitalisasi Posyandu untuk tingkat Kota dan Kabupaten kembali digelar diikuti sekitar 300 bidan. Kegiatan ini ditindak lanjuti dengan pelatihan yang jenisnya disesuaikan dengan keinginan daerah. Dengan meningkatnya kualitas bidan dan pelayanannya diharapkan akan meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan anak.

Melalui pelatihan bidan juga diharapkan akan meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pertolongan pertama kepada pasien (ibu hamil) maupun anak di Posyandu atau klinik binaannya. Langkah bermakna selanjutnya mengawali tahun 2006 Gerakan Revitalisasi Posyandu digelar oleh Walikota Bogor.

]



DAMANDIRI AWARD UNTUK SANG PAHLAWAN

‘**S**ENYUM untuk semua’ adalah wajah Indonesiaku dalam berkiprah melaksanakan Pembangunan Keluarga Sejahtera. ‘Senyum untuk semua’ adalah jawaban manis bangsaku yang ber-Pancasila disaat dunia memikirkan makna bentuk-bentuk penghargaan bagi yang berjasa. ‘Senyum untuk semua’ adalah potret semangat “*melu handarbeni*” (rasa ikut memiliki), seluruh bangsa menepis lara menggapai bahagia sejahtera.

Dalam membangun keyakinan “Bersama Kita Bisa” dan mendorong tumbuhnya teladan-teladan pembangunan, menandai ungkapan syukur Yayasan Damandiri berusia genap satu dasawarsa, ‘Senyum Untuk Semua’ digambarkan dalam bentuk “*Damandiri Award*”.

Penghargaan bergaya khas Indonesia ini inti sasarannya adalah



mengajak masyarakat agar berperan serta lebih giat dalam pembangunan dan dikembangkan secara berkesinambungan dari masa ke masa.

Sebuah keputusan menarik dan strategis. Pemberian Penghargaan berupa Damandiri Award diluncurkan dalam suasana bangsa menggelar tumbuhnya semangat kebersamaan “Bersama Kita Bisa” untuk meningkatkan kualitas warga bangsa dalam menatap era global.

Pendiri yang sekaligus Ketua Yayasan Damandiri Bapak HM. Soeharto, di setiap kesempatan selalu menekankan perlunya terus menerus menggalang sikap “*melu handarbeni*” rasa ikut memiliki. Di Era Reformasi, Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono, mengangkat ‘ungkapan luhur’ itu dalam bahasa yang lebih lugas yaitu “Bersama Kita Bisa”.

Pemberian penghargaan bagi Sang Pahlawan berupa Damandiri



Award bertepatan hari Ulang Tahun ke-10, merupakan wujud apresiasi kepada pihak-pihak yang selama ini peduli dan seiring dengan visi, misi dan tujuan Yayasan Damandiri yaitu menggerakkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Damandiri Award ini memiliki empat kategori yaitu Kategori Pengusaha Mikro Terbaik, Kategori Pembina Usaha Mikro Terbaik; Kategori SMA Terbaik; dan Kategori Bidan Terbaik. Untuk kategori SMA terbaik dipilih dari SMA unggulan di 50 kabupaten dari kurang lebih 100 sekolah SMA yang dinilai.

Penganugerahan Damandiri Award untuk pertama kali, diserahkan kepada teladan-teladan terbaik pada Puncak Acara Peringatan 10 Tahun Yayasan Damandiri tanggal 15 Januari 2006 yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Peringatan Satu Dasawarsa Damandiri juga dimeriahkan “Hajatan Rakyat Damandiri”. Sebuah pasar produk *wong cilik* yang mulai besar karena dibina mitra kerja Yayasan Damandiri, dengan segala acara hiburan dan tontonan tradisional seperti Wayang Kulit, Jathilan, Campur Sari dan lain-lain.

Selamat, Satu Dasawarsa Yayasan Damandiri.

]]]